

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana Indonesia, istilah “tindak pidana” merupakan Istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit*.<sup>1</sup> Sebenarnya banyak istilah yang digunakan yang menunjuk pada pengertian *Strafbaarfeit*. Misalnya, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum dengan perturan-peraturan yang dapat dikenakan hukuman.

Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana dengan perbuatan pidana yang didefinisikan oleh beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>2</sup>

Adapun Istilah Perbuatan Pidana Lebih tepat Alasannya Adalah<sup>3</sup>:

- 1) Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

---

<sup>1</sup> A.Fuas Usfa,dkk, *pengantar Hukum Indonesia*, UMM Press. Universitas Muhammdiyah Malang,2004. Hal 31

<sup>2</sup> Adami Chaawi, *Pelajaran Hukum Pidana* : Bagian 1. PT Radja Grafindo Persada Jakarta 2002 Hal.71

<sup>3</sup> Ibid Hal 71

2) Antara larang (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

3) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah *perbuatan pidana*. Suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua kejadian konkrit, yaitu : *pertama*, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan *kedua*, adanya orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada yang dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan atau tidak.<sup>4</sup>

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu<sup>5</sup>:

1. Melawan Hukum.
2. Merugikan Masyarakat.
3. Dilarang oleh aturan pidana.
4. Pelakunya diancam pidana.

---

<sup>4</sup> Moljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta, 1987, Hal 153

<sup>5</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak tindak Pidana Tertentu didalam KUHP*, CV. Remaja Karya Bandung

## B. Pengertian Delik

Tindak pidana atau Delik merupakan terjemahan dari perkataan strafbaar feit atau delict (bahasa Belanda) atau criminal act (bahasa Inggris), di dalam menterjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia maka dipergunakan bermacam-macam istilah oleh para cerdik pandai bangsa Indonesia. Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah “tindak pidana”. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda, yaitu Delict atau Strafbaar feit. Disamping itu dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah lain, yaitu :

- a) Peristiwa pidana;
- b) Perbuatan pidana;
- c) Pelanggaran pidana;
- d) Perbuatan yang dapat dihukum, dan;
- e) Perbuatan yang boleh dihukum<sup>6</sup>

*feit* telah ada empat istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni<sup>7</sup>:

1. Peristiwa Pidana (Pasal 14 ayat 1 UUD 1950)
2. Perbuatan Pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum (UU No.1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil Pasal 5 sub c)

---

<sup>6</sup> M.Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remadja Karta, Bandung, 1984, hal 1.

<sup>7</sup> Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1969, hlm.3.

3. Tindak Pidana (UU No. 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan DPR)
4. Pelanggaran Pidana (Mr. Tirtaamidjadja, Pokok-pokok Hukum Pidana 1995)

Moeljatno dalam hal ini mempergunakan istilah perbuatan pidana dan mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

1. Perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
2. Perkataan tindak berarti langka dan baru dalam bentuk tindak-tanduk atau tingkah laku.
3. Perkataan perbuatan sudah lajim dipergunakan dalam kecakapan sehari-hari seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan seterusnya dan juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*).

Bahwa perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan, dan juga lebih praktis daripada istilah-istilah lainnya. Istilah ini lebih banyak dipergunakan oleh orang maupun undang-undang sendiri. Istilah tindak yang sering diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan tindak pidana. Istilah tindak pidana ini tidaklah berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap si pelaku maupun terhadap akibatnya.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut.

Perkataan feit itu sendiri di dalam bahasa Belanda yaitu kenyataan berarti sebagian dari suatu kenyataan sedang strafbaar berarti dapat di hukum, hingga secara harfiah perkataan strafbaar feit itu dapat di terjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Oleh karena seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan strafbaar feit, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit tersebut.

Menurut VOS pengertian strafbaar feit adalah <sup>8</sup>:

*suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan diancam pidana.*

Selanjutnya J.E Jonkers mengemukakan pendapat tentang definisi *strafbaar feit* menjadi dua arti<sup>9</sup>:

- a. Definisi pendek adalah suatu kejadian atau *feit* yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;

---

<sup>8</sup> Vos, terpetik dalam Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 86.

<sup>9</sup> J.E. Jonkers, terpetik dalam, *Ibid*, hlm. 86

b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

C.S.T. Kansil mengatakan pengertian *delict* sebagai berikut<sup>10</sup>:

*delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.*

Wirjono Projodikoro mengartikan tindak pidana yaitu<sup>11</sup>:

*tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.*

Moelyatno memberikan definisi mengenai tindak pidana yaitu<sup>12</sup> :

*perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.*

Hazewinkel-Suringa, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* yaitu<sup>13</sup>:

*Suatu prilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai prilaku yang harus ditiadakan, oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.*

Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai<sup>14</sup>:

*Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku*

---

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.284

<sup>11</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 55.

<sup>12</sup> Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54

<sup>13</sup> Hazewinkel-Suringa, terpetik dalam P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.181.

<sup>14</sup> Ibid Hlm. 181

*dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.*

Sungguhpun demikian beliau pun mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni hanya dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana akan disadari dengan melihat kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena di dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar *strafbaare feiten* yang dari rumusan-rumusannya dapat diketahui bahwa tidak satupun dari *strafbaar feiten* tersebut memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu *strafbaar feit* yakni bersifat *weederrechtelijk* dan *strafbaar* atau yang bersifat melanggar hukum, telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan dapat dihukum.

Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki oleh setiap *strafbaar feit*, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma itu harus merupakan suatu perilaku atau yang telah dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja

#### **a. Macam-macam Delik**

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, delik itu dapat dibedakan atas pelbagai pembagian tertentu seperti<sup>15</sup> tersebut dibawah ini :

##### **a) Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrijven en overtredingen*)**

Kejahatan ialah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret, pelanggaran itu hanya

---

<sup>15</sup> P. A. F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

membahayakan in abstracto saja. Secara *kuantitatif* pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu: Untuk mengetahui yang mana delik kejahatan dan yang mana pula delik pelanggaran, dalam KUHP lebih mudah karena jelas kejahatan pada buku II sedangkan pelanggaran pada buku III .

**b) Delik materiel dan formel ( *materiele end formele delicten* )**

Pada delik materiel disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formel, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.

**c) Delik komisi dan delik omisi ( *commissiedelicten end omissiedelicten* )**

Delik komisi ( *delicta commissionis* ) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi ( *omissiedelicten* ) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan ( *nalaten* ). Delik omisi terbagi menjadi dua bagian:

**1) Delik omisi murni**

adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan seperti Pasal 164, 224, 522, 511 KUHP.

**2) Delik omisi tidak murni ( *delicto commissionis per omissionem* )**

Delik ini terjadi jika oleh Undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian). Seperti Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan.



**d) Delik selesai dan delik berlanjut (*af lopende en voortdurende delicten*)**

Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.

**e) Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)**

Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif. Contoh yang paling utama ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti Pasal 296 KUHP.

**f) Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)**

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana/ tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan). Sebaliknya ialah delik berprivilege (*geprivilegieerde delict*), bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah itu unsur atau tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Perbedaan antara delik

bersahaja dan delik berkualifikasi (termasuk *berprivilege*) penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan.

**g) Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*)**

Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

**h) Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)**

Delik politik dibagi atas:

- 1) Yang murni, tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum didalam bab I buku II, Pasal 107. Disini termasuk Landes Verrat dan Hochverrat. Di dalam komperensi hukum pidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai berikut: Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ.
- 2) Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum).

**i) Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune delicten*).**

Delik propia diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dsb.

## **b. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.<sup>16</sup> Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat di pidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.

Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, unsur-unsur kesalahan yakni :

1. Mampu bertanggung jawab;
2. Mempunyai kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*); dan
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur yakni sebagai berikut :

1. Kemampuan bertanggung jawab

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 12.

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal); dan
- b. Kemampuan untuk menentukan keinsyafan tentang baik dan buruknya (perasaan/kehendak).

## 2. Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*)

- a. Kesengajaan, ada 2 (dua) teori yang berkaitan dengan pengertian sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

1) Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Contoh, A mengarahkan pisau kepada B dan A menusuk hingga B mati; A adalah sengaja apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

2) Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan dan membayangkan adanya suatu akibat. Sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sengaja, yakni sebagai berikut <sup>17</sup>:

- 1) Sengaja sebagai maksud, dalam VOS definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.
- 2) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.
- 3) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.

b. Kealpaan (*culpa*)

*Culpa* terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.

---

<sup>17</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti. 1987, hlm. 116.

Dalam *culpa* atau kealpaan, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat di hukum dan dilarang oleh undang-undang. Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :

1. *Culpa* dengan kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap saja timbul akibat tersebut.
2. *Culpa* tanpa kesadaran, dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh UU, sedang ia harusnya memperhitungkan akan suatu akibat.

Sehingga berdasar atas perbedaan antara kedua hal diatas sebagai berikut : *Culpa* dengan kesadaran ini ada jika yang melakukan perbuatan itu ingat akan akibat yang berbahaya itu. Tetapi, tetap saja ia berani melakukan tindakan itu karena ia tidak yakin bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak akan bertindak demikian kalau ia yakin bahwa itu akan timbul.

### c. Pungutan Liar

Pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas

secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungutan liar merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungutan liar melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungutan liar atau pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang<sup>18</sup>

Pungutan Liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan.<sup>19</sup>

Jika dikaji lebih dalam lagi Pungutan Liar merupakan adanya pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung dibawah suatu organisasi atau kelompok secara langsung, dengan adanya tujuan tertentu yang tidak dilandasi suatu aturan legal yang mengaturnya.

#### **d. Unsur-Unsur Pungutan Liar**

Pungutan liar terdiri atas unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif antara lain, yaitu:

---

<sup>18</sup> amodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di JembatanTimbang,". Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol 12 No 2, Januari 2013, hlm. 75

<sup>19</sup> Lijan Poltak Sinambela.2006.*Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*.Sinar Grafika Offset.Jakarta

a) Unsur – unsur objektif<sup>20</sup>

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur objektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 423 KUHP adalah:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara (*deambtenaar*);
2. Menyalahgunakan Kekuasaan (*misbruik van gezag*);
3. Memaksa Seseorang (*iemand dwigen om*) untuk :
  - a. Memberikan Sesuatu (*iets af geven*);
  - b. Membayar (*uitbetaling*);
  - c. Menerima pembayaran dengan potongan, atau (*eene terughouding genoeg nemen bij eene uitbetaling*);
  - d. Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (*een peroonlijken dienst verrichten*).

b) Unsur – unsur Subjektif<sup>21</sup>

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subjektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah:

1. Dengan Maksud Untuk (*met het oogmerk om*) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen*);

---

<sup>20</sup> Wahyu. 2007. Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik. Jurnal Hukum Samsudra Keadilan. Hal. 274

<sup>21</sup> *ibid*



2. Menguntungkan secara melawan hokum (*wederrechtelijk te bevoordelen*)

**e. Pengertian Satgas (Satuan Tugas)**

Satgas (Satuan Tugas) merupakan sebuah kelompok yang berorientasi pada tugas atau kelompok kecil yang dibentuk untuk menangani suatu atau sejumlah pekerjaan.<sup>22</sup> Misalnya Tim kerja , panitia dan kelompok regu yang banyak bentuknya termasuk dalam kategori kelompok satuan tugas.

**f. Tugas Pokok dan Fungsi**

**a) Tugas Pokok**

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.<sup>23</sup>

**b) Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi<sup>24</sup>:

- a. intelijen;
- b. pencegahan;
- c. penindakan; dan
- d. yustisi.

---

<sup>22</sup> Myazinda. 2008. *Kelompok Sosial dan Kehidupan Masyarakat*. Bandung CV. Yasindo Multi Aspek Hal. 20

<sup>23</sup> peraturan presiden republik indonesia nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar

<sup>24</sup> ibid